

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan alat analisis berupa *IBM SPSS 21*. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan dalam Rasio Kemandirian pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Artinya kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa secara rata-rata dalam Rasio Kemandirian lebih tinggi daripada di Pulau Kalimantan.
2. Terdapat perbedaan dalam Rasio Efektifitas pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Artinya kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa secara rata-rata lebih Rendah dalam Rasio Efektifitas daripada di Pulau Kalimantan.
3. Terdapat perbedaan dalam Rasio Aktivitas Belanja Tidak Langsung pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Artinya kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa secara rata-rata lebih tinggi dalam Rasio Aktivitas Belanja Tidak Langsung daripada di Pulau Kalimantan.
4. Terdapat perbedaan dalam Rasio Aktivitas Belanja Langsung pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Artinya kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa secara rata-rata lebih rendah dalam Rasio Aktivitas Belanja Tidak Langsung daripada di Pulau Kalimantan.
5. Terdapat perbedaan dalam Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Artinya kinerja keuangan pemerintah daerah

Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa secara rata-rata lebih tinggi dalam Rasio Aktivitas Belanja Tidak Langsung daripada di Pulau Kalimantan.

6. Terdapat perbedaan dalam Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Artinya kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa secara rata-rata lebih tinggi dalam Rasio Aktivitas Belanja Tidak Langsung daripada di Pulau Kalimantan.
7. Terdapat perbedaan dalam Rasio Pertumbuhan Belanja tidak langsung pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Artinya kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa secara rata-rata lebih tinggi dalam Rasio Aktivitas Belanja Tidak Langsung daripada di Pulau Kalimantan.
8. Terdapat perbedaan dalam Rasio Pertumbuhan Belanja Langsung pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Artinya kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa secara rata-rata lebih rendah dalam Rasio Aktivitas Belanja Tidak Langsung daripada di Pulau Kalimantan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Pulau Jawa dan Kalimantan yang dilakukan dengan waktu penelitian pada Tahun 2013 yang menghasilkan berbagai kesimpulan penelitian, maka penulis mencoba memberikan saran yang berguna untuk :

1. Pemerintah Daerah Kab/Kota di Pulau Jawa dan Kalimantan.
 - a. Perbedaan yang sangat berbeda dan penting untuk dikaji pada kedua Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota salah satunya adalah alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung, di Pulau Jawa pada proporsinya lebih besar untuk alokasi belanja tidak langsung, sedangkan di Pulau Kalimantan lebih berfokus proporsinya untuk alokasi belanja langsung. Sehingga

- untuk Pemerintah Daerah Kab/Kota di Pulau Jawa lebih berusaha mengalokasikan proporsi alokasi belanja langsungnya lebih besar untuk tahun-tahun berikutnya dan mengurangi proporsi alokasi untuk belanja tidak langsung setiap tahunnya.
- b. Perbedaan yang kedua adalah ketergantungan daerah terhadap Bantuan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dalam hal ini kinerja di pulau Kalimantan masih dikategorikan tidak baik karena masih terlalu mengandalkan bantuan Pusat dan Provinsi (dana perimbangan), sehingga untuk kedepannya agar lebih meningkatkan pendapatan asli daerah agar mengurangi ketergantungan tersebut.
2. Peneliti Selanjutnya
- a. Untuk penelitian selanjutnya jika ingin melanjutkan penelitian dengan objek antar Pulau, agar membandingkan kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota di antara kedua Pulau yang memiliki perbedaan karakteristik yang berbeda. Misalnya Pulau Jawa dengan Papua, Pulau Sumatera dengan Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan dengan Pulau Bali.
 - b. Untuk penelitian selanjutnya, dikarenakan keterbatasan waktu dan data yang diambil sehingga penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu diharapkan penelitian selanjutnya agar memperhatikan hal-hal berikut :
 - i. Pengambilan data sekunder lebih mengandalkan data yang lebih akurat dan akuntabel dari Pemerintah Daerah Kab/Kota yang bersangkutan melalui Perda (Peraturan Daerah) bukan dari data yang bisa diunduh lewat BPS (Badan Pusat Statistik) ataupun DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan), dan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri).

- ii. Menggunakan Rasio lain yang belum diteliti di penelitian ini dikarenakan tidak ada datanya yaitu rasio DSCR (*Debt Services Coverage Ratio*) dan rasio efisiensi.
- iii. Menggunakan indikator yang ada pada penelitian Groves et al dikarenakan banyak sekali formula yang bisa dikembangkan untuk penelitian yang lebih bervariasi dan bermanfaat.
- iv. Dikarenakan sudah terlalu sering digunakan yaitu rasio untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, agar mencoba rasio yang digunakan untuk mengukur Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah yang belum banyak dilakukan penelitian.